



## PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PENDIDIKAN

JL. WOLTER MONGINSIDI LATERI –AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON  
NOMOR : // TAHUN 2017

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN HARAPAN MALUKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal , yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia dini Kelompok Bermain Harapan Maluku
- b bahwa Usul Penderian Satuan Kelompok Bermain Harapan Maluku Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon ;
- c Bawa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas , maka Dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain Harapan Maluku
- d Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Harapan Maluku
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
- 2 Undang –undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor4286);
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 tentang Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 82) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
- 5 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negera Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nmnr 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendiirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Harapan Maluku
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Kepada :

Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Harapan Maluku
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Non formal Dan Informal
Alamat	:	JL. Dr. Kayadoe
Desa/Kelurahan	:	Kudamati
Kecamatan	:	Nusaniwe
Penanggung Jawab	:	NY. Oktovina Batmamolin. S.Th
Pemilik Penyelenggara	:	NY. Oktovina Batmamolin. S.Th
Kota	:	Ambon

- KETIGA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2020

- KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditutup dan dicabut izin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Harapan Maluku**

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 24 Januari 2017



Tembusan ;

Kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
U.P Diren PAUD-NI di Jakarta
- 2 Gubernur Maluku ;
- 3 Walikota Ambon ;
- 4 Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Maluku
- 5 Kepala Badan keuangan Kota Ambon ;
- 6 Kepala Bappekot Ambon
- 7 Inspektur Kota Ambon